

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR : 7 TAHUN 2014
 TANGGAL : 20 Januari 2014
 TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN(STD-B)
 KABUPATEN : BANDUNG
 KECAMATAN :

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/ tanggal lahir :
3. NomorKTP :
4. Alamat :

B. DataKebun

I. Kebun1

- Lokasi/ Titik Koordinat kebun (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (*sertipikat hakmilik/ girik / SKT/ sewa/ ...*)
- Nomor :
- Luas areal :hektar
- Jenis tanaman :
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (*monokultur/ campuran dengan tanaman ...*)
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (*mineral/ gambut/ mineral+gambut*)
- Tahun tanam :
- Usahala landi lahan kebun :

II. Kebun2*)

- Lokasi (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (*sertipikat hakmilik/ SKT/ girik/ sewa/ ...*)
- Nomor :
- Luas :hektar
- Jenis tanaman :
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih/ Bibit :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (*monokultur/ campuran dengan tanaman ...*)
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (*mineral/ gambut/ mineral+gambut*)
- Tahun tanam :
- Usahala landi lahan kebun:

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

..... 20.....

An. Bupati Bandung
 Kepala BPMP Kabupaten Bandung

Keterangan:

*) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1 (satu) lokasi

BUPATI BANDUNG
 ttd
 DADANG M NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR : 7 TAHUN 2014
 TANGGAL : 20 Januari 2014
 TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

KAPASITAS PALING RENDAH USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN YANG
 MEMERLUKAN IUP-P*

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1.	KelapaSawit	5ton TBS perjam	CPO, intisawit(<i>palm kernel</i>), tandankosong, cangkang,serat (<i>fiber</i>), <i>sludge</i>
2.	Teh	1ton pucuk segar perhari	Teh Hijau
		10ton pucuk segar perhari	Teh Hitam
3.	Tebu	1.000 Ton Tebu per hari (Ton Cane Day /TCD)	GulaKristal Putih

*)Untuk izin usaha industri pengolahan komoditas perkebunan selain kelapa sawit,teh dan tebu diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN
HASILPERKEBUNAN(STD-P)

KABUPATEN : BANDUNG
KECAMATAN :

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/ tanggal lahir :
3. NomorKTP :
4. Alamat :

B. DataUnit Pengolah

I. Unit Pengolah1

1. Nama :*)
2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitasproduksi : (terpasang/terpakaimenurutsatuan)
4. Jenisbahan baku : (TBS/.....)
5. Sumberbahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
6. Jenisproduksi : (CPO/.....)
7. Tujuanpasar :

II. Unit Pengolah2

1. Nama :
2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitasproduksi : (terpasang/terpakaimenurutsatuan)
4. Jenisbahan baku : (TBS/.....)
5. Sumberbahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
6. Jenisproduksi : (CPO/.....)
7. Tujuanpasar :

III.(dan seterusnya)

.....20.....

An. Bupati Bandung
Kepala BPMP Kabupaten Bandung

.....

*)untuk seluruh komoditas perkebunan

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN
INDUSTRI PENGOLAHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....bertempat di.....,kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama PT.yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama (koperasi perkebunan) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
HAKDANKEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Menerima bahan baku dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan;
 - b. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. bersama-sama dengan Bupati memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen,dsb.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
 - b. mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;
 - c.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan bahan baku kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
 - b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
 - c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
 - d.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama
 - b. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
 - c.

Pasal 2
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3
MASABERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secara berkala setiapbulan/tahun sekali.

Pasal 5
(dst sesuai kebutuhan)

Pasal
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah kabupaten Bandung sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten Bandung tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Bupati.

Parapihak:

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas.....

(.....)

(.....)

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR : 7 TAHUN 2014
 TANGGAL : 20 Januari 2014
 TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP-BUNTUK1(SATU)
 PERUSAHAANATAUKELOMPOK(GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN

No.	Tanaman	Batas Paling Luas (ha)
1	2	3
1	Kelapa	40.000
2	Karet	20.000
3	Kopi	10.000
4	Kakao	10.000
5	Jambu Mete	10.000
6	Lada	1.000
7	Cengkeh	1.000
8	Kapas	20.000

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP UNTUK
1(SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN

No.	Tanaman	Batas Paling Luas (ha)
1	2	3
1	KelapaSawit	100.000
2	Teh	20.000
3	Tebu	150.000

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

KOP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)
PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor.....tanggal.....perihal
Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Perkebunan telah
memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b,perlu menetapkan IUP-B PT.....,dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT..... yang
telah memenuhi persyaratan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan
saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal.....;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor.....tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan
Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;
6. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan
skala 1:100.000 atau1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.;
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi
kehutanan;(Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan)
8. Rencana kerja pembangunan kebun PT.....(termasuk rencana fasilitasi
pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
9. Izin Lingkungan Bupati Nomor..... tanggal.....;
- 10.Surat Pernyataan Direktur PT.....tentang kesanggupan PT.
.....untuk:

- a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- b. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan:
 - pembukaan
 - lahan
 - tanpa
 - bakar
 - serta
 - pengendalian kebakaran;
- c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
- d. melaksanakan
 - kemitraan
 - dengan
 - pekebun,
 - karyawan
 - dan/atau masyarakatsekitar perkebunan.

11. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA

:Jenis tanaman yang diusahakan dalam IUP-B adalah:

1. JenisTanaman :
2. Luasareal Netto :..... ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Produksi diolah di :

KETIGA

:PT.....wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3(tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan Gubernur.

9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, IUP-B dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal,

An. BUPATI BANDUNG
KEPALA BPMP KABUPATEN BANDUNG

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bandung;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

KOP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG.
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)
PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan IUP-P PT....., dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) Kepada PT..... yang telah memenuhi persyaratan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;
6. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (Tidak dicantumkan apabila lokasi industri pengolahan hasil berada di dalam wilayah IUP-B)
7. Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku Untuk Industri Pengolahan PT Nomor..... tanggal..... dan Surat Perjanjian Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Pengolahan antara PT dengan Nomor..... tanggal.....;
8. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan PT.....;

9. Izin Lingkungan Bupati Nomortanggal.....;
- 10.Surat Pernyataan Direktur PT.....untuk melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan Nomor..... tanggal

KEDUA

:Jenis usaha dalam IUP-P adalah:

1. JenisUsaha :
2. Luasareal Netto :ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. KapasitasIndustri Pengolahan :
5. Pemenuhan bahan Bakudengan cara :

KETIGA

:PT.....wajibmentaatiketentuan sebagaiberikut:

1. Memiliki sumber daya manusia,sarana, prasarana dan sistempembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3(tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakatsekitar;dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubernur
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan,baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
11. Melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15.(dicantumkan khusus untuk industri pengolahan kelapa sawit yang seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari koperasi pekebun)

- KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan bakuteknis dan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP-P dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal,

An. BUPATI BANDUNG
KEPALA BPMP KABUPATEN BANDUNG

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bandung;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Direktur Jenderal Perkebunan

.....

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

KOP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggal
.....perihal Permohonan Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT.....;

b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan IUP PT.....dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT..... yang telah memenuhi persyaratan:
1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
 3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor.....tanggal.....
 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;
 6. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan; (Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan)
 8. Jaminan pasokan bahan baku dari kebun milik sendiri dan kebun masyarakat;
 9. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana fasilitasi pembangunankebum masyarakatsekitar);
 - 10.Izin Lingkungan BupatiNomor tanggal.....;

11. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT.untuk:
- a.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c.memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;dan
 - d.melaksanakan kemitraan dengan kebun,karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- 12.Surat Pernyataan dari PT.....bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA

:Komoditi yang diusahakan dalam IUP adalah:

1. Komoditas :
2. Luas areal Netto :..... ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. KapasitasUnit Pengolahan :

KETIGA

:PT.....wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumberdaya manusia,sarana,prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial(BIG);
6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3(tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun,karyawan dan masyarakat sekitar;dan

8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubernur;
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang pertanahan;
11. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, bakuteknis, dan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan bakuteknis dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal,

An. BUPATI BANDUNG
KEPALA BPMP KABUPATEN BANDUNG

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bandung;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Direktur Jenderal Perkebunan

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.....yang akan membangun kebun di wilayah desa.....kecamatan..... kabupaten/kota..... provinsi..... dengan jenis komoditi.....seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk:

- a. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta melakukan perlindungan tanaman dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu(PHT) di lokasi usaha perkebunan di atas;
- b. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas;
- c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan membangun kebun bagi masyarakat sekitar berlokasi di kabupaten Bandung dengan jenis komoditi.....seluasha dengan pola (kredit, bagi hasil atau pola.....) (coret yang tidak perlu); dan
- d. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Perkebunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian antara PT.....dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati.

Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan, maka pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....
materai
(nama jelas)

*

BUPATI BANDUNG

tttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR : 7 TAHUN 2014
 TANGGAL : 20 Januari 2014
 TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT PERNYATAAN
 PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN
 BELUM MENGUASAI LAHAN MELEBIHI
 BATAS PALING LUAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. / Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan.....yang akan membangun kebun diwilayah desa.....kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, saat ini memiliki kebun:

No.	Komoditi	Lokasi Kebun (desa/kec/kabupaten/provinsi)	Luasareal (ha)
1.			
2.			
3.	Dst.....		

Dengan ini menyatakan bahwa PT...../Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan.... belum melampaui batas penguasaan lahan untuk komoditi.....

Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya,maka kami bersedia IUP Yang diterbitkan dibatalkan dan diproses secara hukum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20....
 materai
 (nama jelas)

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT PERNYATAAN
JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN.....

Kamiyangbertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat:.....

Bertindak untuk dan atas nama PT.....yang akan membangun Industri Pengolahan
..... di wilayah desa..... kecamatan.....
kabupaten..... Provinsi.....menyatakan bahwa industri
pengolahan dengan kapasitas*....., penyediaan bahan bakunya bersumber dari:

No.	Sumber Bahan Baku	Lokasi bahan baku (desa/kec/kab/kota)	LuasKebun (Ha)	Volume(satuan*)
1.	Kebun Sendiri			
2.	Perkebunan besar lainnya (PT.....)			
3.	Koperasi			
4.	Kelompok Tani			

Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing-masing sumber bahan bakudi atas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20....
materai

(nama jelas)

*Sesuai dengan satuan kapasitas industri
pengolahan hasil perkebunan pada Lampiran
II

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat:.....

Bertindak untuk dan atas nama PT.....yang akan membangun kebun di wilayah desa..... kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis komoditi.....seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan berupa kemitraan: penyediaan sarana produksi/produksi/pengolahan dan pemasaran/transportasi/operasional/kepemilikan saham/jasa pendukung lainnya.

Dalam pelaksanaannya, kemitraan ini akan dibuat dalam bentuk perjanjian antara PT.....dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati.

Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan, kami belum melakukan kemitraan seperti dimaksud dalam pernyataan ini, pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....
materai
(nama jelas)

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR : 7 TAHUN 2014
 TANGGAL : 20 Januari 2014
 TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

KOP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

PERSETUJUAN BUPATI BANDUNG

NOMOR:

TENTANG

PERUBAHANLUAS LAHAN

PT.....

BUPATI BANDUNG,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihalPermohonan Perubahan Luas Lahan Usaha PT.....dan memperhatikan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal;
 2. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur.....Nomor.....tanggal.....;
 4. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala1:100.000atau1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;(Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan)
 6. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
 7. Izin Lingkungan BupatiNomor.....tanggal.....;
 8. Surat Pernyataan Direktur PT.....tentang kesanggupan PT.....untuk:
 - a.memiliki sumberdaya manusia,sarana,prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman(OPT);
 - b. memiliki sumberdaya manusia,sarana,prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c.memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar Perkebunan.
 9. Surat Pernyataan dari PT.....bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
 - 10.Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian UsahaPerkebunan.
 - 11.Laporan Kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan
- (Untuk pengurangan luas lahan persyaratan hanya memerlukan persyaratan butir1 dan Butir11serta alasan usulan untuk pengurangan lahan)

Dengan ini kami menyetujui penambahan/pengurangan luas lahan dari semula.....ha menjadi.....ha untuk komoditi.....yang berlokasi di desa....., kecamatan.....,kabupaten.....,provinsi.....

Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan/pengurangan luas lahan, perusahaan Saudara wajib:

1. Menyelesaikan perolehan/penyesuaian hak atas tanah untuk perubahan luas lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan tahapan pembangunan kebun sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
3. Menyampaikan perkembangan perusahaan secara berkala paling kurang 1(satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka persetujuan penambahan/pengurangan Luas Lahan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal,.....

An. BUPATI BANDUNG
KEPALA BPMP KABUPATEN BANDUNG

.....

SALINANKeputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

KOP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

PERSETUJUAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN JENIS TANAMAN
PT.....

BUPATI BANDUNG,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal.....perihal Permohonan Perubahan Jenis Tanaman PT..... dan memperhatikan:

1. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rekomendasi dari dinas kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
4. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
5. Izin Lingkungan dari bupati.
6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan

Dengan ini kami menyetujui perubahan jenis tanaman dari semula menjadi.....pada areal perusahaan seluas.....ha yang berlokasi di desa.....,kecamatan.....,kabupaten.....,provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan perubahan jenis tanaman ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan kegiatan pembangunan tanaman yang baru sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
- b. Perkembangan produksi jenis tanaman yang baru secara berkala paling kurang 1(satu) kali 6(enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Perubahan JenisTanaman ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal,

An. BUPATI BANDUNG
KEPALA BPMP KABUPATEN BANDUNG

.....

SALINANKeputusan inidisampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

KOP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

PERSETUJUAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG

PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
PT.....

BUPATI BANDUNG

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal..... perihal Permohonan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) PT..... dan memperhatikan:

1. IUP-P atau IUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas kabupaten yang membidangi perkebunan;
4. Izin Lingkungan dari bupati.
5. Rencana kerja perusahaan untuk penambahan kapasitas unit pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) dari yang semula {(tonTBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} menjadi.....{(tonTBS/jam)/(kgkering/hari)/(ton cane/day)}sesuaisurat nomor.....
6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

Dengan ini kami menyetujui penambahan kapasitas unit pengolahan dari semula.....{(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} menjadi {(ton TBS/jam)/(kgkering/hari)/(toncane/day)}untuk komoditi(kelapasawit/teh/tebu)yangberlokasidides a.....,kecamatan kabupaten.....,provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan kapasitas unit pengolahan, Perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan penyelesaian pembangunan unit pengolahan.
- b. Perkembangan produksi unit pengolahan secara berkala paling kurang 1(satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut diatas tidak dipenuhi maka Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal,

An. BUPATI BANDUNG
KEPALA BPMP KABUPATEN BANDUNG

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

KOP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

PERSETUJUAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TENTANG

DIVERSIFIKASI USAHA PT.....

BUPATI BANDUNG,

Schubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal.....perihal Permohonan Diversifikasi Usaha PT.....dan memperhatikan:

1. IUP-B atau IUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
4. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten
5. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait; dan
6. Izin Lingkungan dari Bupati.
7. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

Dengan ini kami menyetujui diversifikasi usaha.....pada perusahaan perkebunan yang berlokasi di desa....., kecamatan, kabupaten....., provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan diversifikasi usaha ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan kegiatan diversifikasi usaha sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 3.
- b. Perkembangan produksi usaha tanaman pokok/utama dan usaha diversifikasi secara berkala paling kurang 1(satu)kali 6(enam)bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut diatas tidak dipenuhi maka Persetujuan Diversifikasi Usaha ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditandatangani..... pada
tanggal,

An. BUPATI BANDUNG
KEPALA BPMP KABUPATEN BANDUNG

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER